

**PENGARUH PEMBERIAN *UNCONDITIONAL TRANSFER*  
TERHADAP *TAX EFFORT* DAERAH  
(STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**GIGIH WASKITHO**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF UNCONDITIONAL-TRANSFER GIVING ON REGIONAL TAX EFFORT**

**(Study on Regencies/Municipalities in Lampung Province)**

**By**

**GIGIH WASKITHO**

The purpose of this research is to analyze the effect of unconditional transfer, which consists of General Allocation Fund (DAU) and Revenue-Sharing Fund (DBH), to tax effort in regencies/municipalities in Lampung Province.

The method used in this study is by purposive sampling technique, using certain criteria in sampling. The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of Lampung Province, namely in the form of APBD realization data, as well as regional economic data in the form of Gross Regional Domestic Product (PDRB) data of regencies/municipalities in Bandar Lampung Province, from 2010 until 2015.

The results showed that DAU has a positive effect on local tax effort, whereas DBH has a negative effect on regional tax effort.

**Keyword: DAU, DBH and regional tax effort.**

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PEMBERIAN *UNCONDITIONAL TRANSFER* TERHADAP *TAX EFFORT* DAERAH**

**(Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)**

Oleh

**GIGIH WASKITHO**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh atas diberikannya *unconditional transfer*, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap *tax effort* pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik *purposive sampling*, dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu dalam pengambilan sampelnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, yaitu berupa data realisasi APBD, serta data perekonomian daerah berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bandar Lampung, dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap *tax effort* daerah, sedangkan DBH berpengaruh negatif terhadap *tax effort* daerah.

**Kata kunci: DAU, DBH dan *tax effort* daerah.**

**PENGARUH PEMBERIAN *UNCONDITIONAL TRANSFER*  
TERHADAP *TAX EFFORT* DAERAH  
(STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG)**

Oleh

**GIGIH WASKITHO**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMBERIAN *UNCONDITIONAL TRANSFER* TERHADAP *TAX EFFORT* DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Gigih Waskitho**

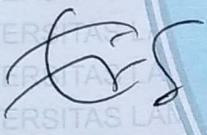
Nomor Pokok Mahasiswa: **1511031146**

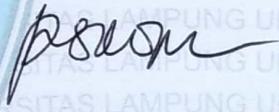
Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

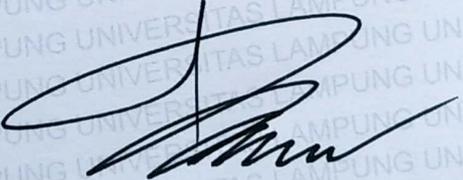
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 197108021995122001

  
**Pigo Nauli, S.E., M.Sc.**  
NIP 198206232008121001

**2. Ketua Jurusan Akuntansi**

  
**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP 196206121990102001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt.**



.....

**Sekretaris : Pigo Nauli, S.E., M.Sc.**



.....

**Penguji Utama : Dr. Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., CA. Akt.**



.....

**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
**NIP 196109041987031011**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 5 September 2017**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian *Unconditional Transfer* Terhadap *Tax Effort* Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan saya ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, September 2017  
Penulis,



Gigih Waskitho

## RIWAYAT HIDUP



Gigih Waskitho, lahir di Sragen pada tanggal 23 Maret 1989 dari pasangan Bapak Eko Wiyono, S.H. dan Ibu Dyah Nurhayati, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Mojo Sragen pada tahun 1995 dan lulus pada tahun 2001. Kemudian, penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Sragen yang diselesaikan pada tahun 2004, lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Sragen hingga lulus pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan Diploma III Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis memulai karir sebagai Auditor Pelaksana pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, sampai akhirnya pada tahun 2015 memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program *State Accountability Revitalization Project (STAR)* yang diselenggarakan oleh BPKP bekerja sama dengan *Asian Development Bank (ADB)*.

## SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala berkah, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemberian *Unconditional Transfer* Terhadap *Tax Effort* Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)”.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu dan memberi semangat, dukungan, serta pemikiran, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang Ibu berikan selama masa perkuliahan.
4. Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang Ibu berikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.

5. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang Bapak berikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.
6. Dr. Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., CA., Akt., selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang Ibu berikan selama proses penyusunan serta penyempurnaan skripsi.
7. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibunda di Sragen, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, kehangatan dan segalanya yang tidak bisa ananda ungkapkan dengan kata-kata. Betapa bersyukur ananda telah dilahirkan dan dibesarkan oleh Bapak dan Ibu. Semoga Allah selalu memberikan rohmat dan kasih sayang-Nya pada Bapak dan Ibu, di dunia dan di akhirat.
9. Istriku, Qoriesa Septina Dewi dan anakku, Hameez Kei Hassya Reswara, terima kasih atas segala keceriaan dan kebahagiaan yang selalu terpancar. Kalian berdua adalah sumber inspirasiku, penyemangatku, yang selalu membuatku yakin bahwa aku selalu dapat melakukan yang terbaik, lebih baik dari yang kubayangkan.
10. Adikku, Inti Briliani, terima kasih selalu menjadi saudara dan sahabat yang terbaik, yang selalu ada di kala suka maupun susah, serta selalu menyenangkan untuk diajak bertukar pikiran serta pengetahuan.
11. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch 2 Universitas Lampung, terima kasih atas kerjasama dan kekompakan selama dua tahun ini.

12. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala bentuk saran, kritik dan masukan sangat diharapkan. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung,      September 2017  
Penulis,

Gigih Waskitho

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
PERNYATAAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
SANWACANA .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS .....	7
A. Kajian Pustaka .....	7
1. Tinjauan Teori .....	7
a. Otonomi Daerah .....	7
b. Pajak Daerah .....	9
c. Kapasitas Fiskal .....	9
d. Kemalasan Fiskal .....	10
2. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	10
B. Rerangka Pemikiran .....	12
C. Hipotesis .....	13
III. METODE PENELITIAN .....	15
A. Populasi dan Sampel .....	15
B. Jenis dan Sumber Data .....	15
C. Definisi Operasional Variabel .....	16
1. Dana Alokasi Umum .....	16
2. Dana Bagi Hasil .....	16

3. <i>Tax Effort</i> .....	17
D. Metode Analisis .....	19
1. Analisa Regresi .....	19
2. Uji Asumsi Klasik .....	19
a. Uji Normalitas .....	19
b. Uji Autokorelasi .....	19
c. Uji Multikolinearitas .....	20
d. Uji Heteroskedastisitas .....	20
3. Uji Hipotesis .....	21
a. Uji Koefisien Determinasi .....	21
b. Uji Statistik F .....	21
c. Uji Statistik t .....	22
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	23
A. Populasi dan Sampel.....	23
B. Statistik Deskriptif Penelitian .....	23
C. Hasil Pengujian Asumsi Klasik .....	25
1. Uji Normalitas .....	25
2. Uji Autokorelasi .....	26
3. Uji Multikolinearitas .....	27
4. Uji Heteroskedastisitas .....	28
D. Hasil Pengujian Hipotesis .....	30
1. Uji Koefisien Determinasi .....	30
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	31
3. Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....	32
V. SIMPULAN DAN SARAN .....	40
A. Simpulan .....	40
B. Saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....	43
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Hasil Pengolahan Data Statistik Variabel Independen dan Variabel Dependen .....	2
4.2 Hasil Uji Normalitas Untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> .....	25
4.3 Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> .....	26
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas Untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> .....	27
4.5 Hasil Uji Multikolinearitas Untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> Menggunakan Uji Glejser .....	28
4.6 Koefisien Determinasi <i>Tax Effort</i> .....	30
4.7 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	31
4.8 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) .....	32
4.9 Rangkuman Hasil Uji t .....	33
4.10 Realisasi Belanja Modal Kab./Kota di Prov. Lampung 2010-2015 .....	34
4.11 Perolehan Pajak Daerah Kab./Kota di Prov.Lampung 2010-2015 .....	35
4.12 Perolehan Pajak Daerah dari PBB P2 Setelah Implementasi UU No. 28 Tahun 2009 .....	37
4.13 Perolehan Dana Bagi Hasil Pajak pada Kab./Kota di Provinsi Lampung 2011-2015 .....	38

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Untuk Variabel Dependen <i>Tax Effort</i> Dengan Menggunakan Grafik <i>Scatterplots</i> .....	2

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

- 1 Rekapitulasi Data Keuangan Kab/Kota Di Provinsi Lampung 2010-2015
- 2 Data *Tax Effort* Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Lampung 2010-2015
- 3 Hasil Uji Normalitas
- 4 Hasil Uji Autokorelasi
- 5 Hasil Uji Multikolinearitas
- 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas
- 7 Hasil Uji Regresi

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Awal dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah sejak diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui peraturan ini diharapkan tiap-tiap daerah di Indonesia mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Ardhani, 2014).

Muliana, dalam Ariani (2010) menyebutkan bahwa penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah, apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang kuat pula.

Dalam pelaksanaannya, ternyata banyak ditemui kendala dan masalah terkait otonomi daerah di Indonesia. Selain demografi dan sumber daya tiap daerah yang berbeda-beda, ada satu hal lagi yang harus dihadapi, yaitu adanya disparitas (kesenjangan) fiskal dan perbedaan kemampuan investasi antar daerah. Selain itu tidak dapat dipungkiri pula bahwa daerah pada umumnya kurang memiliki kemampuan finansial untuk mendanai program-program yang melibatkan proyek-proyek dalam skala besar yang ditujukan untuk membangun fasilitas-fasilitas vital daerah, seperti bangunan sekolah serta infrastruktur jalan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, pemerintah pusat menganggarkan bantuan transfer kepada pemerintah daerah, dalam bentuk Dana Perimbangan Daerah. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Brodjonegoro dan Vazquez (2002), transfer tersebut secara teknis terbagi menjadi 2 macam, yakni *Conditonal Transfer* (Transfer Bersyarat) dan *Unconditonal Transfer* (Transfer Tidak Bersyarat). *Conditonal Transfer*, yang berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), diberikan oleh pemerintah pusat dengan disertai instruksi yang mengikat, sehingga dalam penggunaannya nanti pemerintah daerah wajib melaksanakan secara spesifik sesuai dengan ketentuan dari pusat. Sedangkan *Unconditonal Transfer*, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bentuk bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah serta mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam penggunaannya, DAU dan DBH ini diserahkan sepenuhnya

kepada daerah untuk dikelola sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah, dengan harapan bahwa tiap daerah nantinya akan mempunyai tingkat kesiapan yang relatif sama terutama dalam hal keuangan dalam mengimplementasikan otonomi daerah.

Namun, kenyataan menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur kelangsungan pemerintahannya, yang ditunjukkan dengan adanya ketergantungan yang lebih besar kepada dana *unconditional transfer* dari pemerintah pusat, yaitu DAU dan DBH dibandingkan dengan PAD dalam mendanai belanja daerah. Dominannya peran dana transfer dari pusat tersebut terhadap PAD dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidaklah memberikan gambaran yang baik bagi pemerintahan, terutama terkait dengan tujuan awal diberikannya dana transfer itu tersebut.

PAD, terdiri dari beberapa komponen pembentuk, salah satunya yaitu Pajak Daerah. Apabila pemerintah daerah terlalu mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat, yaitu melalui DAU dan DBH, maka PAD tidak lagi menjadi sesuatu yang amat penting dan perlu diperjuangkan. Naganathan dan Sivagnanam (1999) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian dana transfer pemerintah pusat terhadap *tax effort* di India, menyimpulkan bahwa *unconditional transfer* dari pemerintah pusat yang berupa *Per Capita Non-Plan Grants* (PNPG) pada akhirnya justru akan menyebabkan pemerintah daerah mengurangi usahanya dalam menghasilkan pendapatan secara mandiri, termasuk di dalamnya adalah upaya untuk memperoleh pendapatan pajak daerah (*tax effort*) yang diharapkan semakin meningkat kontribusinya dari

tahun ke tahun. Beberapa penelitian serupa di berbagai negara yang dilakukan pada tahun-tahun setelahnya, hampir semuanya menghasilkan simpulan yang senada dengan penelitian Naganathan dan Sivagnanam di India tersebut.

Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Sarug dan Sagbas (2008) di Turki mengenai dampak *unconditional revenue sharing*, *flypaper effect* dan *tax effort* di daerah-daerah perkotaan di Turki, ternyata ditemukan hasil yang berbeda, di mana *tax effort* cenderung mengalami peningkatan pada kota-kota padat penduduk, di mana jumlah *grant* yang diterimanya dari pusat meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada penelitian Sarug dan Sagbas ini, dapat tergambar bagaimana tujuan awal pemberian transfer pemerintah pusat ke daerah ini telah tercapai dengan baik.

Dari Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, diketahui bahwa Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Provinsi Lampung per tahun 2016 ada pada angka 0,23 atau dapat dikategorikan rendah. IKF dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung per tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kabupaten/Kota	IKF	Kategori
1	Lampung Barat	0,17	rendah
2	Tanggamus	0,20	rendah
3	Lampung Selatan	0,13	rendah
4	Lampung Timur	0,16	rendah
5	Lampung Tengah	0,16	rendah
6	Lampung Utara	0,13	rendah
7	Way Kanan	0,25	rendah
8	Tulang Bawang	0,45	rendah
9	Pesawaran	0,21	rendah
10	Pringsewu	0,34	rendah
11	Mesuji	1,08	tinggi
12	Tulang Bawang Barat	0,72	sedang
13	Pesisir Barat	0,15	rendah
14	Bandar Lampung	0,32	rendah
15	Metro	0,79	sedang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi Lampung dalam memaksimalkan penerimaan atau pendapatan dari wilayahnya sendiri, masih sangatlah rendah. Disinyalir bahwa salah satu penyebab rendahnya PAD ini adalah rendahnya penerimaan pajak daerah dari kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, sekaligus mengingat bahwa penelitian mengenai *tax effort* di Indonesia masih sangat sedikit dilakukan, penulis ingin mengadakan penelitian, dengan menganalisis variabel DAU terhadap upaya pajak atau *tax effort* pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Selain itu, penulis juga mencoba untuk menambahkan variabel independen lainnya selain DAU, yaitu DBH, mengingat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis jadikan rujukan, belum ada penelitian yang memasukkan DBH sebagai variabel independen. Padahal pada prinsipnya, DBH juga merupakan *unconditional transfer* atau transfer tanpa syarat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu penulis juga ingin menguji kembali hasil-hasil dari penelitian terdahulu, sebab ternyata tidak semua penelitian tersebut menyimpulkan hal yang sama, sehingga perlu kiranya bagi penulis melakukan penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan khazanah dan pandangan baru dalam isu *tax effort*, serta agar dapat memberikan kontribusi terutama bagi Provinsi Lampung dalam bidang anggaran dan pendapatan daerah. Maka dari itu, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pemberian *Unconditional Transfer* Terhadap *Tax Effort* Daerah**”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah DAU berpengaruh terhadap *tax effort*?
2. Apakah DBH berpengaruh terhadap *tax effort*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh DAU terhadap *tax effort*
2. Menganalisis pengaruh DBH terhadap *tax effort*

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini akan berguna untuk menambah referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik dalam bidang kajian mengenai upaya pajak/*tax effort* daerah.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan saran atau masukan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Tinjauan Teori**

###### **a. Otonomi Daerah**

Definisi Otonomi Daerah menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan Otonomi Daerah, antara lain:

- 1) Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik di semua bidang, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, masyarakat di daerah dapat merasakan langsung manfaat dari pelaksanaan otonomi daerah.
- 2) Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat. Pengembangan ini dilakukan dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat pada proses politik yang berlangsung di daerah, seperti Pilkada, penyaluran aspirasi di DPRD, atau partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.

- 3) Untuk mewujudkan keadilan nasional di tingkat daerah. Oleh karena itu, semua kebijakan yang akan dirumuskan terkait hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, harus memperhatikan keadilan dan keselarasan, sehingga tidak ada daerah yang dirugikan karena kebijakan yang salah dalam menata hubungan pemerintah pusat dan daerah.
- 4) Untuk pemeratakan kemakmuran daerah, yang dimaksudkan agar tidak ada lagi daerah yang merasa kurang beruntung dari daerah lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan program pembangunan agar tidak terpusat di daerah tertentu saja. Program otonomi daerah memungkinkan pemerataan program pembangunan hingga mencapai pelosok. Dengan meratanya pembangunan, penduduk tidak lagi berbondong-bondong datang dan memadati daerah tertentu saja.
- 5) Untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, dengan mengikutsertakan semua potensi yang ada pada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di daerah dapat dilakukan melalui usaha kecil di daerah yang melibatkan lima aktor penting yang sangat besar peranannya dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah, investor, pengusaha daerah, dan masyarakat itu sendiri.

6) Untuk meningkatkan daya saing daerah, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan potensinya dan bersaing dengan daerah lainnya. Dengan adanya semangat persaingan tersebut, maka setiap daerah-daerah di Indonesia akan terdorong untuk semakin mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.

#### **b. Pajak Daerah**

Mardiasmo (2003) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa secara umum pajak mempunyai dua fungsi yaitu : (1) Fungsi *budgetair*, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan (2) Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **c. Kapasitas Fiskal**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.07/2016, kapasitas fiskal adalah *gambaran* kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk memaksimalkan penerimaan atau pendapatan dari daerahnya sendiri, yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana

pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan.

#### **d. Kemalasan Fiskal**

Teori kemalasan fiskal ini pertama kali dikemukakan oleh Bird dan Fiszbein (1998), yaitu di mana terdapat indikasi kuat bahwa dengan adanya transfer fiskal yang sangat besar yang dikucurkan dari pusat ke daerah setelah kebijakan desentralisasi fiskal diterapkan, ada kecenderungan kalangan elit pemerintah daerah menjadi bermalasan dan kurang dalam upaya dalam memacu serta meningkatkan kinerja fiskal daerahnya.

## **2. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Sivagnanam dan Naganathan (1999) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian dana transfer pemerintah pusat terhadap *tax effort* India. Dana transfer tersebut berupa *Per capita Finance Commission transfers* (PFC), *Per capita Plan Grants* (PPG), *Per capita Non-plan Grants* (PNPG) dan *Per capita State Domestic Product* (PCSDP). Hasil penelitian tersebut menunjukkan variabel independen yang mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax effort* secara signifikan adalah PNPG atau di Indonesia disebut dengan DAU.

Brodjonegoro dan Vazquez (2002) melakukan analisis mengenai pemberian transfer pemerintah pusat. Menurut mereka, seharusnya DAU tidak berpengaruh pada *tax effort* pemerintah daerah karena dalam pemberian DAU pemerintah pusat telah mempertimbangkan faktor

kapasitas fiskal. Namun, dalam kenyataannya tetap ada kemungkinan bahwa pemberian *unconditional transfer* akan berpengaruh pada upaya pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD-nya melalui pajak daerah. Ini tergambar dari hasil penelitian mereka, bahwa ternyata pada daerah yang DAU-nya bertambah dari tahun sebelumnya, *tax effort*-nya justru malah menurun.

Adi (2008) melakukan penelitian mengenai relevansi transfer pemerintah pusat dengan *tax effort* pada pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa. Penelitian ini menggunakan DAU sebagai variabel independen dan variabel *tax effort* sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa DAU tidak memberikan pengaruh positif terhadap *tax effort*, dengan tingkat signifikansi sebesar 10%. Artinya, pemberian DAU yang semula bertujuan untuk mengurangi kesenjangan horizontal, justru menjadi disinsentif bagi daerah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal daerahnya. *Tax effort* menjadi lebih rendah dan harapan adanya peningkatan kemandirian daerah justru menjadi semakin jauh dari kenyataan.

Sarug dan Sagbas (2008) melakukan penelitian mengenai dampak *unconditional revenue sharing* dan *flypaper effect* dan *tax effort* di daerah-daerah perkotaan di Turki. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pada kota-kota yang lebih padat penduduknya dan lebih tinggi tingkat peningkatan *grant*-nya, ternyata *tax effort*-nya juga semakin meningkat.

Ariani (2010) mengadakan penelitian untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan DAU terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

dan *tax effort* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Hasilnya adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif untuk variabel belanja modal terhadap *tax effort*, sementara itu variabel DAU tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax effort*.

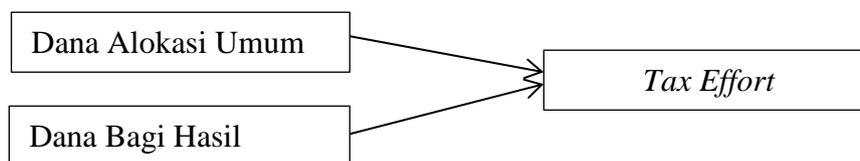
Pevcin (2012), lewat penelitiannya tentang pendapatan transfer, belanja daerah dan *tax effort* pada kota-kota di Slovenia menyimpulkan bahwa jika pemerintah lokal hanya berfokus pada *lump-sum grant* sebagai sumber dana dalam belanja daerahnya, maka hal tersebut hanya akan menurunkan kemampuan daerah tersebut dalam memberdayakan sumber-sumber pendapatan lainnya, termasuk di dalamnya adalah pajak.

## **B. Rerangka Pemikiran**

*Tax Effort* merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah, yang dapat diukur melalui perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam satu tahun anggaran daerah tersebut. *Tax effort* yang baik memungkinkan tercapainya peningkatan PAD, di mana dengan pencapaian PAD yang bagus maka nantinya akan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah dalam berbagai sektor.

Dana transfer pemerintah pusat ke daerah, yang berwujud *unconditional transfer*, yaitu DAU dan DBH, merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam mengurangi kesenjangan fiskal serta ketimpangan

kemampuan keuangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Namun, pada praktiknya DAU dan DBH seringkali dipandang sebagai sumber utama pendapatan dalam belanja pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya justru mengabaikan keberlangsungan upaya dalam memperoleh pendapatan daerah secara mandiri, salah satunya melalui penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk dilakukan penelitian dengan DAU dan DBH sebagai variabel independen dan *tax effort* sebagai variabel dependen.



### C. Hipotesis

Transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan fenomena umum, terlebih pada negara yang menerapkan desentralisasi fiskal. Pada pemberian transfer yang didasarkan pada kapasitas fiskal daerah, semakin tinggi kapasitas fiskal daerah, maka transfer yang diterima menjadi semakin rendah. Kebijakan ini di satu sisi dapat mengatasi ketimpangan fiskal secara horizontal, tetapi di sisi lain justru dapat menyebabkan kemalasan fiskal daerah (Nanga, 2006), di mana daerah menjadi tidak terpacu untuk memaksimalkan potensi daerahnya dengan meningkatkan PAD. Padahal DAU seharusnya menjadi insentif bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya. Sivagnanam and Naganathan (1999) juga telah memberikan fakta empiris bahwa pemberian transfer yang tanpa rencana yang jelas dari pemerintah pusat justru akan memberikan pengaruh negatif terhadap upaya pengumpulan pajak (*tax effort*) di daerah.

**H<sub>1</sub> : DAU berpengaruh negatif terhadap *Tax Effort***

Senada dengan Sivagnanam dan Naganathan (1999), Brodjonegoro dan Vazquez juga menyimpulkan dalam hasil penelitiannya mengenai *unconditional* transfer di Indonesia, bahwa transfer pemerintah pusat ke daerah yang tanpa disertai ketentuan dan prosedur yang jelas justru akan membuat daerah menjadi “malas” dalam mengumpulkan pendapatan daerahnya, dalam hal ini yang berupa pajak daerah. Dari penelitian yang dilakukan Brodjonegoro dan Vazquez tersebut, juga dari penelitian-penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan, komponen DBH sebagai variabel independen belum pernah dimasukkan ke dalam model penelitian. Padahal pada prinsipnya, DBH juga merupakan *unconditional transfer* dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sehingga penulis berpendapat bahwa DBH juga akan memberikan pengaruh negatif terhadap *tax effort* di daerah.

**H<sub>2</sub> : DBH berpengaruh negatif terhadap *Tax Effort***

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi Lampung. Teknik pengambilan sampel (*sampling*) yang digunakan yaitu secara *purposive sampling*. Pertimbangan-pertimbangan obyek yang dijadikan sampel antara lain:

1. Kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi Lampung.
2. Kabupaten/kota yang bukan merupakan daerah baru hasil pemekaran selama kurun waktu 2010-2015.
3. Data yang diteliti merupakan data yang berasal dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, yaitu berupa data realisasi APBD, serta data perekonomian daerah berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bandar Lampung, dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

### C. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini akan digunakan dua variabel independen, yaitu DAU dan DBH, serta satu variabel dependen, yaitu *tax effort*. Penjelasan lebih rinci dari variabel-variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan sepenuhnya pada daerah, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

#### 2. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku.

Secara garis besar DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH sumber daya alam (SDA)/DBH Non Pajak, dengan rincian sebagai berikut:

a. DBH Pajak, bersumber dari:

- Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB P3)
- Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

b. DBH Sumber Daya Alam, bersumber dari:

- Kehutanan
- Pertambangan Umum
- Perikanan
- Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- Pertambangan Panas Bumi

Perlu diketahui bahwa sebelum UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbit, DBH Pajak bersumber salah satunya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, sejak undang-undang tersebut terbit dan mulai diberlakukan, PBB yang disetor ke pemerintah pusat hanyalah PBB P3, sedangkan jenis PBB lainnya yaitu PBB Perdesaan & Perkotaan (PBB P2) menjadi penerimaan bagi daerah sebagai Pajak Daerah.

### 3. *Tax Effort*

Upaya pajak (*tax effort*) merupakan rasio antara pajak aktual yang dapat dipungut dengan kapasitas pajak sebagai basil estimasi (Mulyanto, 2007). *Tax effort* merupakan indikator kemampuan suatu negara atau suatu

daerah untuk dapat memanfaatkan secara optimal kapasitas pajak yang dapat dipungut.

Kirana, dalam Soekristiono (2003) menyatakan bahwa perkembangan PDRB per kapita riil dapat dilihat dari semakin tingginya pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dengan analogi yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintah daerahnya.

Menurut Mulyanto (2007), *tax effort* adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dilawankan dengan potensi pajak (*tax capacity*). Dengan kata lain, *tax effort* dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkat.

$$Tax\ Effort = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{PDRB\ Kabupaten/Kota} \times 100$$

## D. Metode Analisis

### 1. Analisis Regresi

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda. Data yang telah didapatkan akan diolah dengan menggunakan program SPSS. Persamaan regresinya dapat ditulis secara matematik sebagai berikut:

$$TE_i = \beta_0 + \beta_1 DAU_i + \beta_2 DBH_i + \mu_i$$

$TE_i = Tax\ Effort$        $DAU_i = Dana\ Alokasi\ Umum$        $\mu_i = error\ term$

$B_{(0,1,2)} = parameter$        $DBH_i = Dana\ Bagi\ Hasil$

### 2. Uji Asumsi Klasik

Beberapa uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian adalah one-sample Kolomogorov-Smirnov Test. Model regresi dikatakan memiliki residual berdistribusi normal apabila Asymp. Sig (2-tailed) diatas signifikansi sebesar 0,05.

#### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara error term pada periode  $t_1$  dengan error term pada periode  $t_2$ . Autokorelasi dapat terjadi jika nilai gangguan

dalam periode tertentu berhubungan dengan gangguan sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi sehingga dapat lebih efisien.

Asumsi autokorelasi diuji dengan menggunakan Uji *Durbin Watson*. Nilai *Durbin Watson* merupakan dasar untuk menentukan apakah telah terjadi autokorelasi atau tidak. Untuk mendapatkan nilai *Durbin Watson*, maka dilakukan pengolahan data melalui SPSS. Setelah itu dilakukan perbandingan antara nilai *Durbin Watson* yang diperoleh dengan nilai *Durbin Watson* dari tabel. Apabila nilai *Durbin Watson* yang diperoleh lebih besar dari nilai tabel, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terdapat autokorelasi.

#### **c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dalam penelitian ini pengujian terhadap multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Batas terjadinya multikolinearitas adalah nilai  $VIF > 10$  dan nilai *Tolerance*  $< 0,10$ .

#### **d. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan Uji Glejser dan *scatter plots*.

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, di mana hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi ( $R^2$  *adjusted*) antara nol dan satu atau  $0 < R^2 < 1$ . Jika  $R^2$  mendekati 1, ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan dapat dikatakan baik. Sedangkan bila nilai  $R^2$  mendekati 0, berarti bahwa variabel bebas sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel terikat sehingga model yang digunakan semakin kurang tepat.

#### b. Uji Statistik F

Uji F menunjukkan apakah variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Sehingga dengan uji F dapat menjadi dasar dalam pengambilan simpulan mengenai ada atau tidaknya pengaruh DAU dan DBH terhadap *tax effort*.

Pengujian koefisien regresi dengan menggunakan uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis nol diterima jika *tax effort* tidak dipengaruhi secara bersama-sama oleh DAU dan DBH. Hipotesis nol ditolak apabila salah satu atau beberapa parameter ( $\beta$ ) tidak sama dengan nol.

### c. Uji Statistik t

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individual maka dilakukan pengujian dengan uji t. Pengujian koefisien regresi dengan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah:

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen.

Apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif dapat diterima atau variabel independen tersebut berpengaruh secara individu terhadap variabel dependennya.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Setelah dilakukan analisis hasil pembahasan pada bab IV, maka pada bab ini akan dibahas mengenai simpulan hasil penelitian serta saran.

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil simpulan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam hal ini DAU dan DBH memberikan pengaruh yang berbeda terhadap variabel dependen yaitu *tax effort*, di mana DAU memberikan pengaruh secara positif terhadap *tax effort*, sedangkan DBH memberikan pengaruh negatif terhadap *tax effort*.
2. Dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap *tax effort*, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung secara umum cukup baik dalam mengelola DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat, dalam kaitannya mewujudkan capaian *tax effort* yang semakin meningkat. Dengan penganggaran dan pengelolaan yang tepat, DAU ini tidak hanya mampu mengurangi kesenjangan fiskal secara horizontal yang direalisasikan lewat pembangunan di segala bidang, tetapi juga terbukti meningkatkan pencapaian PAD, khususnya dari sektor Pajak Daerah.

3. Masih beradaptasinya pemerintah daerah terhadap DBH dengan proporsi baru setelah terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disinyalir menjadi penyebab masih belum berhasilnya DBH mendongkrak capaian *tax effort* daerah dalam kurun waktu 2010-2015. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah menjadi harus merestrukturisasi ulang pola penganggarannya yang bersumber dari DBH. Inilah yang mungkin menyebabkan pemberian DBH pada kabupaten dan kota di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2010-2015 ini berpengaruh negatif terhadap capaian *tax effort* daerah.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Lampung agar meningkatkan kinerjanya dalam mengumpulkan PAD-nya, terutama dari pajak daerah, sehingga tujuan diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai, salah satunya ditandai dengan capaian *tax effort* yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Di sisi lain pemerintah daerah juga harus semakin meningkatkan pencapaian PAD, karena dari Peta Kapasitas Fiskal per tahun 2015 secara umum kabupaten dan kota di Provinsi Lampung belum mampu memaksimalkan potensi PAD-nya yang sebetulnya masih sangat besar dan dapat digali lebih dalam lagi. Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan agar segera bergerak cepat dalam memformulasikan anggaran yang dananya bersumber dari DBH secara tepat, sehingga ke depannya DBH dapat berperan langsung secara positif dalam peningkatan perolehan PAD yang nantinya akan menghasilkan *tax effort* daerah yang semakin meningkat.

2. Kepada pemerintah pusat agar ke depannya mempertimbangkan capaian *tax effort* ini sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan dana transfer ke daerah, dalam artian daerah yang capaian *tax effort*-nya kurang baik mungkin dapat diberikan sanksi berupa pengurangan jumlah dana transfer untuk tahun berikutnya, begitu pula sebaliknya. Sehingga diharapkan, pemerintah daerah juga semakin terpacu lagi untuk mengumpulkan PAD yang berasal dari pajak daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan untuk mengkaji ulang mengenai perumusan formula dalam menentukan besaran DAU dan DBH yang diberikan ke daerah, sehingga diharapkan dana-dana tersebut akan dapat terserap oleh daerah secara baik dan sesuai tujuan.
3. Kepada mahasiswa yang berminat melakukan penelitian mengenai *tax effort* agar semakin memperluas ruang lingkup penelitian, tidak hanya di Provinsi Lampung saja, melainkan juga di provinsi-provinsi yang lain, bahkan seluruh Indonesia. Terkait dengan kemungkinan masih banyaknya faktor-faktor lain yang mempengaruhi capaian *tax effort*, dapat dipertimbangkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Selain itu, ke depannya dapat juga dilakukan penelitian mengenai efektivitas dari implementasi UU No. 28 Tahun 2009, terutama yang berkaitan dengan pajak daerah, sehingga nantinya hasil penelitian tersebut sekaligus akan dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2008. "Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah". *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ardhani, Septyas Virgi. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tax Effort (Upaya Pajak) dan Alokasi Belanja Modal Di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Ariani, Kurnia Rina. 2010. Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2011-2015. Bandar Lampung. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Tinjauan Ekonomi Regional Daerah Otonom di Provinsi Lampung 2011-2015. Bandar Lampung. Indonesia.
- Brodjonegoro, Bambang dan Jorge Martine-Vasquez. 2005. "An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospect". Department of Economics at Georgia State University. Atlanta.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Potter. 2009. *Basic Econometrics*. Third Edition. McGraw-Hill. New York.
- Hartono, Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. BPF. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Mulyanto. 2007. *Aspek dan Dimensi Keuangan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.
- Nanga, Muana. 2006. Dampak Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

- Pevcin, Primož. 2012. "Transfer Revenues, Expenditures and Tax Effort of Slovenian Municipalities". *African Journal of Business Management Vol.6 (22)*, pp. 6721-6728. Faculty of Administration University of Ljubljana.
- Saruc, Naci Tolga dan Isa Sagbas. 2008. "The Surge Impact of the Flypaper, Substitution and Stimulation Effect on Local Tax Effort in Turkey". *International Research Journal of Finance and Economics*. EuroJournals Publishing, Inc.
- Sivagnanam, K., Jothi dan M., Naganathan. 1999. "Federal Transfers And The Tax Efforts Of The States In India". *Munich Personal RePec Archive Paper No. 3208*. University of Madras.
- Soekristiono. 2003. Kontribusi Tax Effort, Efektivitas dan Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kabupaten Blora. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah